



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN TENAGA
KEFARMASIAN DALAM MELAKSANAKAN PROSEDUR PELAYANAN
KEFARMASIAN DI PUSKESMAS KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022**

Hayuningsih Siskayani, Rossi Suparman, Mamlukah, Lely Wahyuniar

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan

hayuningsih.siskayani@gmail.com

Abstrak

Apoteker Puskesmas dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Data Tenaga Kefarmasian yang didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Indonesia sebanyak 77.492 orang. Tenaga Kefarmasian di Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.937 orang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu tahun 2022. Jenis penelitian ini analitik deskriptif dengan desain *cross sectional* (potong lintang). Populasi penelitian ini berjumlah 36 orang dan pengambilan sampel dengan Teknik *total sampling*. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar kuesioner tertutup. Hasil penelitian meunjukkan terdapat hubungan antara pendidikan ($p = 0,009$), status kepegawaian ($p = 0,014$) dan kepemilikan SIP ($p = 0,036$) dengan kepatuhan tenaga kefarmasian. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin ($p = 0,658$), masa kerja ($p = 0,422$) dengan kepatuhan tenaga kefarmasian. Variabel kepemilikan SIP menjadi variabel yang paling dominan yang berhubungan dengan kepatuhan tenaga kefarmasian dengan nilai $p = 0,036$ dan OR 1,312 (95% CI : 0,177 – 2,784). Diharapkan tenaga kefarmasian dapat mematuhi setiap prosedur pelayanan kefarmasian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Kata Kunci: Kefarmasian, SIP, Kepatuhan



Pendahuluan

Semakin kompleksnya pelayanan kesehatan khususnya di bidang kefarmasian, menuntut apoteker untuk memberikan orientasinya kepada pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 58 tahun 2014 menyebutkan bahwa apoteker khususnya yang bekerja di Puskesmas dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Setiap tenaga apoteker tidak terkecuali yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki izin yang disebut sebagai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan tempat tenaga kefarmasian bekerja. SIP berlaku selama lima tahun dan harus diperpanjang setelahnya (Peraturan Pemerintah Nomor 51, 2009).

Menurut Badan PPSDM Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia, data Tenaga Kefarmasian yang didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Indonesia sebanyak 77.492 orang. Tenaga Kefarmasian di Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.937 orang (PPSDM Kemenkes RI, 2021). SIP merupakan hal yang wajib baik bagi tenaga apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian berupa pelayanan kefarmasian yaitu diapotek, puskesmas atau instalasi farmasi pada klinik maupun bagi

tenaga apoteker yang melaksanakan pekerjaan berupa perbekalan farmasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan (Permenkes RI Nomor 889, 2011).

Salah satu kabupaten di Indonesia adalah Kabupaten Indramayu. Total tenaga farmasi di seluruh Puskesmas di Kabupaten Indramayu sebanyak 35 orang, dimana hanya terdapat 16 orang (45,7%) yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan tenaga kefarmasian terhadap prosedur pelayanan kefarmasian seperti kepemilikan SIP dan kelengkapan prosedur tetap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu (Dinkes Indramayu, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Tenaga Kefarmasian Dalam Melaksanakan Prosedur Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu Tahun 2022.

Metode

Jenis penelitian ini yaitu analitik deskriptif dengan rancangan *cross sectional*. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, status kepegawaian, masa kerja, pendidikan dan kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP). Sedangkan variabel terikatnya yaitu kepatuhan tenaga kefarmasian dalam



melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh tenaga kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu tahun 2022 sebanyak 36 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara *total sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan lembar kuesioner tertutup. Analisis data dilakukan 3 tahap yaitu analisis univariat, analisis bivariat menggunakan uji *Chi-Square*, dan analisis multivariate menggunakan uji Regresi Logistik dengan alpha 5%. Penelitian dilakukan bulan April Tahun 2022.

Hasil

Tabel 1. Analisis Univariat

No	Variabel	Frekuensi (f)	Persentase (n)
Jenis Kelamin			
1	Laki-Laki	10	27,8
	Perempuan	26	72,2
Status Kepegawaian			
2	PNS	21	58,3
	Non PNS	15	41,7
Masa Kerja			
3	<1 tahun	13	36,1
	>1 tahun	23	63,9
Pendidikan			
4	D3 Apoteker	23	63,9
	S1 Apoteker	13	36,1
Kepemilikan SIP			
5	Tidak Memiliki SIP	15	41,7
	Memiliki SIP	21	58,3
Kepatuhan Melaksanakan Prosedur Kefarmasian			
6	Tidak Patuh	8	22,2
	Patuh	28	77,8

(Sumber : Penelitian, 2022)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 36 responden didapatkan hasil sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang (72,2%), berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 orang (58,3%), paling banyak sudah bekerja >1 tahun sebanyak 23

orang (63,9%), memiliki tingkat pendidikan D3 Apoteker sebanyak 23 orang (63,9%), telah memiliki SIP sebanyak 21 orang (58,3%), serta sudah patuh melaksanakan prosedur kefarmasian sebanyak 28 orang (77,8%).



Tabel 2. Analisis Bivariat

No	Variabel	Kepatuhan Melaksanakan Prosedur Kefarmasian				Total		P. Value	OR (95% CI)
		Tidak Patuh		Patuh		n	%		
		n	%	n	%				
1	Jenis Kelamin							1,800	
	Laki-Laki	3	30	7	70	10	100	(0,340- 9,538)	
	Perempuan	5	19,2	21	80,8	26	100		
2	Status Kepegawaian							2,600	
	PNS	6	28,6	15	71,4	21	100	(0,445- 15,177)	
	Non PNS	2	13,3	13	86,7	15	100		
3	Masa Kerja							2,111	
	<1 tahun	4	30,8	9	69,2	13	100	(0,428- 10,423)	
	>1 tahun	4	17,4	19	82,6	23	100		
4	Pendidikan							0,926	
	D3	5	21,7	18	78,3	23	100	(0,182- 4,711)	
	S1	3	23,1	10	76,9	13	100		
5	Kepemilikan SIP							3,00	
	Tidak Memiliki SIP	5	33,3	10	66,7	15	100	(0,590- 15,262)	
	Memiliki SIP	3	14,3	18	85,7	21	100		

(Sumber : Hasil Uji Chi Square Menggunakan SPSS 25)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ($p = 0,009$), status kepegawaian ($p = 0,014$) dan kepemilikan SIP ($p = 0,036$) dengan kepatuhan tenaga kefarmasian di Puskesmas

Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Namun tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin ($p = 0,658$), masa kerja ($p = 0,422$) dengan kepatuhan tenaga kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu Tahun 2022.

Tabel 3. Analisis Multivariat

Variabel	Koefisien	S.E	Nilai p	OR	95% CI	
					Min	Max
Pendidikan Terakhir	0.084	0.191	0,014	0.503	0.020	0,996
Status Kepegawaian	0.159	0.162	0,009	0.894	0.253	1,893
Kepemilikan Surat Izin Praktik	0.213	0.160	0,036	1.312	0.177	2,784
Constanta	0.811	0.572	0,000	0,000		

(Sumber: Hasil Uji Regresi Logistik Menggunakan SPSS 25)



Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki nilai $P < 0,05$ yaitu pendidikan terakhir, status kepegawaian dan kepemilikan SIP yang artinya terdapat hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu. Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu tahun 2022 yaitu kepemilikan SIP dengan nilai $p = 0,036$ dan OR 1,312 (95% CI : 0,177 – 2,784).

Pembahasan

Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Kepatuhan Melaksanakan Prosedur Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian di puskesmas Kabupaten Indramayu (p value $0,658 > 0,05$). Laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama sebagai seorang tenaga kesehatan dalam melaksanakan

Tenaga kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu memiliki jenjang

pendidikan D3 dan S1, sehingga tidak menutup kemungkinan, baik para tenaga kefarmasian laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan prosedur pelayanan kesehatan sesuai keilmuan yang telah didapatkan. Sebagaimana menurut Robbins (2003) mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan memecahkan masalah dalam suatu pekerjaan (Siwi, 2020).

Namun berbeda pandangan menurut Ukkas (2017) yang mengemukakan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Pada pekerja dengan jenis kelamin pria umumnya tingkat produktivitas lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Hal ini karena penelitian tersebut dilakukan pada sektor industri kecil.

Hubungan Antara Status Kepegawaian Dengan Kepatuhan Melaksanakan Prosedur Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status kepegawaian dengan kepatuhan melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian di puskesmas Kabupaten Indramayu (p value $0,014 < 0,05$). Responden yang berstatus Non PNS dinilai



berisiko 2,600 kali lebih besar untuk tidak patuh melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian.

Status kepegawaian menjadi aspek penting untuk melihat komitmen organisasional dalam meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana menurut Dais *et al.*, (2021) mengemukakan jika PNS menginginkan kenaikan jenjang karir, maka ia harus menjaga dan meningkatkan kinerjanya, sehingga ketika ada promosi jabatan, ia dapat ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut.

Sejalan dengan penelitian Hendrajana *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja karyawan antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, dimana kinerja pegawai tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai tidak tetap ($p \text{ value} = 0,000 < 0,05$). Didukung juga oleh penelitian Yuhansyah *et al.*, (2019) yang mengemukakan bahwa makin rendah status kepegawaian maka akan semakin tinggi tingkat ketidakamanan kerja (nilai $r = 0,126$).

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Amri (2021) dalam bidang kerja keperawatan yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara status kepegawaian

dengan kinerja perawat pelaksana di RSAU dr. Esnawan Antariksa. Perawat honorer lebih mempunyai kinerja lebih baik dari pada perawat PNS dan Militer.

Hubungan Antara Masa Kerja Dengan Kepatuhan Melaksanakan Prosedur Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu Tahun 2022

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kepatuhan melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu ($p \text{ value} 0,422 > 0,05$). Masa kerja bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, karena tenaga kefarmasian yang memiliki masa kerja < 1 tahun pun memiliki peluang yang sama untuk patuh dalam melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian.

Kepatuhan terhadap prosedur pelayanan kefarmasian tidak hanya dilihat dari masa kerja, namun juga dapat mengacu pada fungsi kepemimpinan dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja karyawannya. Sebagaimana menurut Amalia and Mudayana (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja, dimana tenaga kesehatan dengan



kepemimpinan kurang baik memiliki kemungkinan kinerja 1,497 kali lebih baik daripada tenaga kesehatan yang memiliki kepemimpinan kurang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Winarso *et al.*, (2019) di bidang pelayanan kebidanan yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan masa kerja dengan kepatuhan terhadap SOP pelayanan ANC (*p value* 0,471 > 0,05). Mayoritas bidan telah patuh terhadap SOP pelayanan ANC. Sejalan juga dengan penelitian Putri, (2022) menunjukkan tidak terdapat hubungan antara lama bekerja dengan kualitas pemberian pelayanan antenatal (*p value* = 0.211).

Hubungan Antara Pendidikan Dengan Kepatuhan Melaksanakan Prosedur Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian (*p value* 0,009 < 0,005). Responden yang memiliki pendidikan D3 Farmasi dinilai berisiko 0,926 kali lebih besar untuk tidak patuh melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia (Ukkas, 2017). Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor

yang bisa mempengaruhi, seperti hubungan dengan atasan dan rekan kerja sangat penting untuk suatu organisasi dan persepsi terhadap pekerjaan (Bachtiar, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan Rahayu and Mulyani (2021) yang menyatakan pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sejalan juga dengan Due (2017) dalam bidang pelayanan keperawatan yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja perawat pengelola perawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Bajawa (*p value* 0,001 < 0,05).

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan Casnuri (2018) dalam bidang pelayanan kebidanan yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara pendidikan di pelayanan antenatal pada responden penelitian (*p value* = 0.370). Hal ini karena motivasi dari dalam diri bidan yang kurang dan kurangnya pengawasan dan komitmen dari bidan koordinator untuk memperhatikan setiap bidan dalam melaksanakan tindakan layanan antenatal kepada ibu hamil.

Hubungan Antara Kepemilikan SIP Dengan Kepatuhan Melaksanakan Prosedur Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas



Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP) dengan kepatuhan melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu (*p value* 0,036 < 0,05). Responden yang tidak memiliki SIP dinilai berisiko 3 kali lebih besar untuk tidak patuh melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian. Proporsi responden yang telah patuh dalam pelayanan kefarmasian, lebih banyak yang sudah memiliki SIP. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan SIP merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam kepatuhan melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian.

Peneliti berasumsi bahwa adanya Surat Izin Praktik (SIP) akan meningkatkan rasa tanggung jawab tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selain itu, SIP akan menjadi pegangan kuat bagi seorang tenaga farmasi dalam menumbuhkan rasa percaya pasien terhadap mutu pelayanan di Puskesmas tersebut. Hal ini karena risiko yang sangat tinggi bagi profesi tenaga farmasi menyangkut keselamatan dan kesehatan pasien serta warga masyarakat luas dalam memberikan perbekalan obat.

Adanya Surat Izin Praktik (SIP) merupakan suatu bentuk pengawasan mutu tenaga kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas. Pengawasan mutu tenaga kesehatan merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan. Pengawasan mutu tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Nurlinawati et al., 2020).

Kesimpulan

Terdapat hubungan antara pendidikan, status kepegawaian dan kepemilikan dengan kepatuhan tenaga kefarmasian. Namun, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin, dan masa kerja dengan kepatuhan tenaga kefarmasian. Kepemilikan SIP merupakan faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kepatuhan tenaga kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu Tahun 2022.

Saran

Diharapkan tenaga kefarmasian dapat mematuhi setiap prosedur pelayanan kefarmasian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia diikuti dengan meningkatkan keterampilan dan



kemampuannya melalui pendidikan pelatihan secara berkelanjutan. Serta bagi tenaga kefarmasian yang belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dapat segera mengurusnya sebagai tanda pengakuan yang sah untuk menjalani pekerjaannya atau praktik profesinya.

Karakteristik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Non PNS Dilihat Dari Model Motivasi Abraham Maslow Dan Tipe Pegawai Berdasarkan Mbt (Myers-Briggs Type Indicator) Serta Tingkat Kepuasan Kerja Pegawai Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Manajemen*, 3(3).

Daftar Pustaka

- Amalia, M., & Mudayana, A. A. (2019). Hubungan Kepemimpinan Dan Komunikasi Dengan Kinerja Tenaga Kesehatan Di Seluruh Puskesmas Kota Yogyakarta. *Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta*.
- Amri, K. (2021). Hubungan Status Kepegawaian Perawat Terhadap Kinerja Perawat Pelaksana Rawat Inap Rsau Dr. Esnawan Antariksa. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Penerbangan*, 1(1), 16–22.
- Bachtiar, R. (2016). *Hubungan pengembangan sumber daya manusia (sdm) dengan kinerja pegawai dalam peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas batua kecamatan manggala kota makassar tahun 2015*. Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Casnuri. (2018). Hubungan Karakteristik Dan Pengetahuan Bidan Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap Pencegahan Infeksi Di BPM Wilayah Sleman Yogyakarta. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(2), 43–50.
- Dais, C., Ridwan, W. A., & Indrawati, N. S. (2021). Analisis Perbandingan Karakteristik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Non PNS Dilihat Dari Model Motivasi Abraham Maslow Dan Tipe Pegawai Berdasarkan Mbt (Myers-Briggs Type Indicator) Serta Tingkat Kepuasan Kerja Pegawai Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Manajemen*, 3(3).
- Dinkes Indramayu. (2022). *Profil SDM Kesehatan*.
- Due, Y. M. B. M. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Perawat Pengelola Perawatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Tahun 2016* [Universitas Terbuka Jakarta]. <http://repository.ut.ac.id/7530/1/43033.pdf>
- Hendrajana, I., Sintaasih, D. K., & Saroyeni, P. (2017). Analisis hubungan status kepegawaian, komitmen organisasional dan kinerja karyawan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 357–384.
- Nurlinawati, I., Rosita, R., & Sumiarsih, M. (2020). Mutu Tenaga Kesehatan Di Puskesmas: Analisis Data Risnakes 2017. *AN-NUR: Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 109–117.
- PPSDM Kemenkes RI. (2021). *Data Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan*.
- Putri, S. A. (2022). Hubungan Faktor Internal dan Eksternal Bidan dalam



- Pelayanan Antenatal di Puskesmas Kota Padang. *Maternal Child Health Care*, 1(1), 18–28.
- Rahayu, K. D., & Mulyani, E. (2021). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Puskesmas Kapanewon Temon, Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 59–70.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, ijin praktik, dan ijin kerja tenaga kefarmasian. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2011.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009.
- Robbins. (2003). *Organizational Behaviour*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siwi, M. A. A. (2020). Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Arjasa Kota Malang. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 8(2).
- Ukkas, I. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja industri kecil kota palopo. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2).
- Winarso, S. P., Rahayu, P. P., & Sumiyati, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Antenatal Care. *Jurnal Sains Kebidanan*, 1(1), 30–38.
- Yuhansyah, Y., Fuadi, A. M., & Sirait, N. A. J. (2019). Hubungan Antara Status Kepegawaian Dengan Ketidakamanan Kerja (Job Insecurity) Pada Perawat Di RSUD Datu Sanggul Rantau Dan Rsud H. Badaruddin TANJUNG. *Borneo Nursing Journal (BNJ)*, 1(1), 32–47.